



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN PIMPINAN BADAN LEGISLASI
ATAS
EVALUASI PELAKSANAAN PROLEGNAS RUU PRIORITAS TAHUN 2022,
PENYUSUNAN PROLEGNAS RUU PRIORITAS TAHUN 2023, DAN
PROLEGNAS RUU PERUBAHAN KEEMPAT TAHUN 2020-2024
DALAM RAPAT PARIPURNA DPR RI
Tanggal 15 Desember 2022**

Disampaikan oleh: Dr. H. Ach. Baidowi, S.Sos., M.Si.
Wakil Ketua Badan Legislasi, A-472

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam Sejahtera bagi kita semua

Yth. Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan;

**Yth. Saudara Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
Hadirin yang berbahagia.**

Pertama-tama marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya kita semua dapat menghadiri Rapat Paripurna ini dalam keadaan sehat waláfiat.

Selanjutnya perkenalkan saya selaku Pimpinan Badan Legislasi atas nama Badan Legislasi menyampaikan laporan hasil evaluasi pelaksanaan Program Legislasi Nasional RUU Prioritas Tahun 2022, penyusunan dan

pembahasan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2023 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Keempat Tahun 2020-2024 yang dilakukan oleh Badan Legislasi bersama Menteri Hukum dan HAM dan Panitia Perancang UU DPD RI.

Pimpinan, Anggota Dewan, dan hadirin yang kami hormati,

Ketentuan Pasal 105 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Jo. Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Jo. Pasal 6 ayat (2) Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang menyebutkan bahwa Penyusunan Prolegnas antara DPR, DPD, dan Pemerintah dikoordinasikan oleh DPR melalui Badan Legislasi.

Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Jo. Pasal 121 ayat (1) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib disebutkan bahwa, hasil pembahasan Prolegnas antara Badan Legislasi, Alat Kelengkapan DPD RI, serta Menteri atau Kepala Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan disepakati menjadi Prolegnas dan selanjutnya dilaporkan oleh Badan Legislasi dalam Rapat Paripurna DPR untuk ditetapkan.

Perlu kami sampaikan bahwa sebelum penyusunan Prolegnas Tahun berikutnya (Prolegnas Tahun 2023), Badan Legislasi bersama Menteri Hukum dan HAM serta Panitia Perancang UU DPD RI melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Prolegnas Tahun berjalan (Prolegnas Tahun 2022) yang terdiri dari

40 (empat puluh) RUU. Dalam evaluasi Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2022 yang telah dilaksanakan dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Telah disetujui menjadi UU : 13 RUU;
2. Tidak dilanjutkan pembahasan : 2 RUU;
3. Pembicaraan Tk. I : 8 RUU;
4. Menunggu Penugasan Pemb. Tk I : 1 RUU;
5. Menunggu Surpres : 3 RUU;
6. Menunggu Pentp. sbg RUU Usul DPR : 2 RUU;
7. Proses harmonisasi di Baleg : 2 RUU; dan
8. Proses penyusunan di DPR & Pemth. : 10 RUU.

Mengingat adanya 15 RUU yang telah selesai pembahasannya, waktu yang masih tersedia, dan usulan RUU baru dari beberapa Komisi, Pemerintah, dan DPD RI, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2022.

Terkait dengan penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2023, Badan Legislasi DPR RI telah menerima usulan RUU sebanyak 102 (seratus dua) RUU yang berasal dari:

1. Komisi, Fraksi, Anggota DPR RI, dan masyarakat, sebanyak 82 (delapan puluh dua) RUU;
2. Pemerintah, sebanyak 13 (tiga belas) RUU; dan
3. DPD RI, sebanyak 7 (tujuh) RUU.

Terhadap 102 (seratus dua) RUU tersebut di atas, Badan Legislasi DPR RI, Kementerian Hukum dan HAM RI, dan Panitia Perancang Undang-Undang DPD RI, sepakat untuk menggunakan parameter terhadap usulan RUU yang akan dimasukkan dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2023, yaitu:

1. RUU yang masih dalam tahap Pembicaraan Tingkat I;
2. RUU yang menunggu Surat Presiden (Surpres);
3. RUU yang telah selesai dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pementapan konsepsi di Badan Legislasi DPR RI;
4. RUU yang dalam tahap pengharmonisasian, pembulatan, dan pementapan konsepsi di Badan Legislasi DPR RI; dan
5. RUU usulan baru yang telah tercantum dalam Prolegnas Tahun 2020-2024 dan memenuhi urgensi tertentu.

Pada akhirnya dalam Rapat Kerja Badan Legislasi dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Panitia Perancang Undang-Undang DPD RI yang diselenggarakan pada tanggal 20 September 2022 telah memutuskan dan menyepakati evaluasi Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2022, penyusunan dan pembahasan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2023 dan evaluasi Prolegnas RUU Perubahan Ketiga Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

1. Prolegnas RUU Perubahan Prioritas Tahun 2022 sebanyak 32 (tiga puluh dua) RUU;
2. Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2023 sebanyak 38 (tiga puluh delapan) RUU dengan rincian, 26 (dua puluh enam) RUU diusulkan oleh DPR RI, 12 (dua belas) RUU diusulkan oleh Pemerintah, dan 2 (dua) RUU diusulkan oleh DPD RI; dan
3. Prolegnas RUU Perubahan Keempat Tahun 2020-2024 sebanyak 257 (dua ratus lima puluh tujuh) RUU.

Terhadap hasil evaluasi Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2022, penyusunan dan pembahasan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2023, dan Prolegnas RUU Perubahan Keempat Tahun 2020-2024, dapat kami laporkan bahwa berdasarkan pendapat mini fraksi-fraksi yang disampaikan juru bicara masing-masing fraksi, serta pendapat Pemerintah, semua Fraksi menyetujui secara bulat hasil evaluasi Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2022, penyusunan dan pembahasan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2023, dan Prolegnas RUU Perubahan Keempat Tahun 2020-2024.

Namun demikian hasil penyusunan Prolegnas ini belum dapat ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR, mengingat dalam Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus tanggal 16 November 2022 memutuskan untuk menugaskan Baleg untuk membahas sesuai mekanisme atas usulan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dari Komisi V DPR RI dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2023.

Menindaklanjuti penugasan Bamus tersebut, pada tanggal 23 November 2022, Baleg Bersama Pemerintah dan PPUU DPD RI telah menyetujui dan menyepakati untuk menambahkan 3 RUU dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2023, yaitu:

1. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, (usulan DPR RI/Komisi V);
2. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, (usulan Pemerintah); dan
3. RUU tentang Pengadaan Barang dan Jasa Publik, (usulan Pemerintah).

Namun kembali hasil keputusan bersama Baleg dengan Pemerintah dan PPUU DPD RI inipun belum dapat ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR RI, karena dalam Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus tanggal 1 Desember 2022 yang lalu ada beberapa Fraksi yang berubah sikapnya terhadap RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2023, maka Bamus menugaskan Baleg untuk membahas kembali dengan Pemerintah dan DPD RI terkait RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ.

Menindaklanjuti penugasan Bamus tersebut, Baleg pada tanggal 12 Desember 2022 melaksanakan Rapat Kerja dengan Pemerintah dan PPUU DPD RI yang pada akhirnya memutuskan dan menyepakati untuk mengeluarkan 2 RUU dari daftar Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2023, yaitu:

1. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ.
2. RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (sudah ditetapkan sebagai UU)

Dengan dikeluarkannya 2 RUU tersebut dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2023, maka:

1. Prolegnas RUU Perubahan Prioritas Tahun 2022 sebanyak 32 (tiga puluh dua) RUU;

2. Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2023 sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) RUU dengan rincian, 24 (dua puluh empat) RUU diusulkan oleh DPR RI, 12 (dua belas) RUU diusulkan oleh Pemerintah, dan 3 (tiga) RUU diusulkan oleh DPD RI; dan
3. Prolegnas RUU Perubahan Keempat Tahun 2020-2024 sebanyak 259 (dua ratus lima puluh sembilan) RUU.

(adapun daftar Prolegnas RUU Perubahan Prioritas Tahun 2022, Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2023, dan Prolegnas RUU Perubahan Keempat Tahun 2020-2024 sebagaimana yang sudah disampaikan kepada Bapak/Ibu Anggota.)

Pimpinan, Anggota Dewan, dan hadirin yang kami hormati,

Demikianlah Laporan hasil evaluasi Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2022, penyusunan dan pembahasan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2023, dan Prolegnas RUU Perubahan Keempat Tahun 2020-2024, untuk selanjutnya Badan Legislasi menyerahkan kepada Rapat Paripurna yang terhormat ini untuk menetapkan sesuai dengan mekanisme penyusunan Prolegnas.

Sebelum mengakhiri laporan ini, izinkanlah kami menyampaikan terima kasih kepada semua Anggota Badan Legislasi, Anggota Panitia Perancang Undang-Undang DPD RI, dan Menteri Hukum dan HAM beserta jajarannya yang telah bekerja secara maksimal untuk menyelesaikan penyusunan Prolegnas ini dalam suasana yang penuh demokratis. Kami juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan perhatian dan dukungan kepada kegiatan Badan Legislasi, baik dari Pimpinan Dewan, Anggota Dewan, Fraksi, Staf Sekretariat Badan Legislasi, dan Tim Ahli yang telah memberikan dukungan secara maksimal.

Terima kasih,

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

**Jakarta, 15 Desember 2022
PIMPINAN BADAN LEGISLASI
WAKIL KETUA,**

ttd

DR. H. ACH. BAIDOWI, S.SOS., M.Si.
A-472